

Pendekatan *America First* Era Trump: Refleksi atas Strategi Kemandirian Logistik dan Doktrin Pertahanan Indonesia

Eko Supri Setiawan¹, Mochamad Rochman², Tarsisius Susilo³, Andy Mustafa Akad⁴, Joko Prasetyo⁵

^{1,2,3,4,5} Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad)

E-mail: milobs78@gmail.com¹, muhammaddarwis69@gmail.com², muchsus70@gmail.com³, asepapandi95@gmail.com⁴, sanovashana@gmail.com⁵

Article History:

Received: 11 September 2025

Revised: 30 September 2025

Accepted: 06 Oktober 2025

Keywords: *America First, Nasionalisme Sumber Daya, Doktrin Pertahanan, Kepemimpinan, Indonesia Emas 2045*

Abstrak: Penelitian ini menganalisis implikasi kebijakan *America First* Donald Trump terhadap doktrin pertahanan dan kemandirian logistik Indonesia. Latar belakang penelitian didasarkan pada meningkatnya urgensi nasionalisme sumber daya dan strategi pertahanan adaptif dalam tatanan dunia multipolar. Tujuan penelitian adalah merefleksikan secara teoritis bagaimana model kepemimpinan, transformasional, adaptif, dan strategis-militer dapat memberikan wawasan bagi penguatan postur pertahanan Indonesia. Metode yang digunakan adalah kualitatif melalui kajian literatur, analisis kebijakan, dan analisis SWOT dengan memanfaatkan data sekunder berupa karya akademik, laporan pertahanan, dan studi kebijakan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun *America First* menekankan reindustrialisasi, proteksionisme, dan nasionalisme sumber daya, logika tersebut dapat diadaptasi secara selektif di Indonesia. Indonesia memiliki kekuatan berupa industri pertahanan BUMN dan kerangka hukum, namun masih menghadapi kelemahan berupa ketergantungan teknologi dan keterbatasan riset. Peluang berupa bonus demografi dan sumber daya strategis perlu dimanfaatkan, sementara ancaman embargo, disrupsi rantai pasok, dan rivalitas geopolitik harus diantisipasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Indonesia perlu merumuskan doktrin pertahanan proaktif, adaptif, dan integratif, berakar pada Pancasila dan nilai kebangsaan TNI, serta relevan dengan visi Indonesia Emas 2045.

PENDAHULUAN

Kebijakan luar negeri yang menekankan nasionalisme ekonomi dikenal sebagai *America First* merupakan inti dari pendekatan strategis pemerintahan Donald Trump yang menjabat sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) sejak 2017. Pendekatan ini menuntut penolakan terhadap

multilateralisme, mendorong proteksionisme, serta memperkuat kapasitas industri dalam negeri melalui berbagai langkah kebijakan, termasuk tarif perdagangan dan pembekuan bantuan luar negeri (Dufour & Ducasse, 2020). Fenomena ini sekaligus menjadi refleksi bagi negara-negara berkembang termasuk Indonesia dalam merumuskan kemandirian logistik dan kebijakan pertahanan nasional, terutama di tengah ketegangan geopolitik dan ketergantungan pada impor komponen strategis.

Permasalahan utama yang ingin dijawab dalam penelitian ini adalah: bagaimana praktik *America First* dalam pengelolaan sumber daya strategis dan kebijakan pertahanan AS dapat menyajikan pelajaran dan refleksi bagi strategi kemandirian logistik dan doktrin pertahanan Indonesia? Isu ini relevan karena kebijakan proteksionis AS berdampak langsung terhadap akses pasar dan rantai pasok global, yang turut dirasakan oleh negara-negara seperti Indonesia (IDEI, 2025).

Penelitian terdahulu telah menyoroti berbagai aspek *America First*. Dufour & Ducasse, (2020) membahas kembalinya isolasionisme ekonomi AS sebagai titik balik dalam hukum perdagangan internasional, yang dipicu oleh penolakan terhadap multilateralisme dan upaya menjaga dominasi industri domestik. Sementara itu, Antonio (2020) mengurai bagaimana *America First* melemahkan tatanan liberal post-Cold War dan menegaskan kembali kompetisi kekuatan besar sebagai pondasi kebijakan luar negeri AS era Trump.

Dalam ekonomi politik dan nasionalisme sumber daya, (Fetzer, 2020) menyajikan tinjauan mendalam tentang *economic nationalism*, menekankan pentingnya kerangka interdisipliner dalam memahami hubungan antara ekonomi dan identitas nasional. Di sisi lain, (Fetzer, 2020) menggambarkan bagaimana *nationalism* sumber daya berkembang dalam berbagai sistem politik dengan strategi yang berbeda tergantung pada institusi domestik dan dinamika politik.

Fokus penelitian ini adalah merangka refleksi strategis: melihat kembali bagaimana pendekatan *America First* dalam hal proteksionisme, industrialisasi pertahanan, dan kontrol atas sumber daya strategis, dapat dijadikan model adaptif oleh Indonesia. Politik proteksionisme AS, misalnya, mengganggu akses ekspor komoditas utama Indonesia, seperti tekstil, elektronik, dan sawit yang pada gilirannya menuntut pergeseran strategi ekonomi dan diplomasi.

Literatur yang relevan juga mencakup penelitian tentang reindustrialisasi AS dan dampaknya terhadap negara mitra. Misalnya, penelitian empiris oleh (Root, 2025) menunjukkan bahwa kebijakan tarif AS sempat memicu peningkatan registrasi usaha baru, tetapi efek positif ini tergerus oleh kebijakan balasan dari mitra dagang. Hal ini menekankan dilema proteksionisme: meski ditujukan untuk memicu industri lokal, efek globalnya belum tentu memberikan manfaat bagi negara mitra.

Dalam kompetensi pertahanan, meski tidak secara eksplisit disebutkan dalam penelitian-penelitian di atas, implikasi *America First* terhadap dinamika aliansi strategis, seperti review terhadap pakta AUKUS dan ketegangan terhadap penjualan persenjataan AS membuka ruang bagi pengkajian ulang ketergantungan Indonesia terhadap mitra eksternal dalam hal pengadaan dan logistik pertahanan (Root, 2025).

Dengan demikian, penelitian ini akan mengeksplorasi elemen-elemen utama dari *America First*, yakni proteksionisme, nasionalisme sumber daya, dan reindustrialisasi pertahanan dan bagaimana elemen-elemen tersebut dapat diinterpretasikan sebagai refleksi strategis untuk memperkuat kemandirian logistik dan doktrin pertahanan Indonesia. Kerangka konseptual akan mensintesis teori kepemimpinan strategis, nasionalisme ekonomi, dan reformasi doktrin pertahanan nasional dalam konstelasi tantangan dan peluang geopolitik global.

LANDASAN TEORI

Teori Kepemimpinan Transformasional

Transformasional (Burns & Bass) James MacGregor Burns memperkenalkan konsep transformational leadership pertama kali dalam karyanya *Leadership* (1978), di mana ia membedakan antara kepemimpinan transaksional yang menukar loyalitas atau kinerja dengan reward dengan transformasional, yang menginspirasi perubahan nilai dan moral antara pemimpin dan pengikut. Burns menegaskan bahwa pemimpin transformasional mengangkat pengikut dan dirinya ke level motivasi dan moral yang lebih tinggi (Burns, 2010). Bernard Bass kemudian mengembangkan teori ini lebih lanjut, menekankan pentingnya komponen seperti *idealized influence*, *inspirational motivation*, *intellectual stimulation*, dan *individualized consideration* yang mendorong inovasi dan loyalitas kelompok.

Menurut Heifetz (1998) memperkenalkan kepemimpinan adaptif, yaitu kemampuan pemimpin untuk menghadapi tantangan yang tidak bisa diselesaikan dengan rutinitas dan keahlian teknis saja. Kepemimpinan ini mendorong pemimpin meng-handle ketidakpastian, mengurai masalah dengan memobilisasi perubahan nilai dan budaya, serta menjaga ketegangan sosial pada tingkat yang produktif untuk perubahan. Heifetz menekankan teknik seperti diagnosis situasi, menjaga tekanan adaptif agar tidak destruktif, dan menciptakan ruang bagi tanggung jawab kolektif dalam menghadapi tantangan.

Pendekatan transformasional dan adaptif sangat relevan dalam konteks kepemimpinan pertahanan, yang memerlukan visi strategis jangka panjang, mobilisasi sumber daya di tengah ancaman, dan adaptasi doktrin terhadap dinamika ancaman baru. Kepemimpinan strategis-pertahanan mensyaratkan integrasi visi moral, adaptasi atas kompleksitas lingkungan, dan kemampuan organisasi militer untuk bertransformasi sesuai tantangan.

Konsep Nasionalisme Sumber Daya dan Kemandirian Pertahanan

Nasionalisme sumber daya merupakan suatu paradigma kebijakan negara dalam mengelola sumber daya strategis dengan menempatkan kepentingan nasional sebagai prioritas utama, sekaligus membatasi dominasi asing dalam sektor yang dianggap vital bagi keberlanjutan bangsa. Wilson (2015) menegaskan bahwa nasionalisme sumber daya tidak semata-mata berakar pada aspek ekonomi, tetapi juga mencerminkan dinamika politik domestik dan kepentingan geopolitik. Menurutnya, setiap negara mengartikulasikan nasionalisme sumber daya secara berbeda, bergantung pada sistem politik, kapasitas institusi, serta visi pembangunan nasional yang ingin dicapai. Hal ini menjelaskan mengapa kebijakan nasionalisme sumber daya di negara demokratis dengan mekanisme pasar terbuka akan berbeda dengan negara yang memiliki struktur politik otoritarian atau berbasis patronase.

Di Indonesia, konsep nasionalisme sumber daya diwujudkan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan memperkuat kedaulatan ekonomi sekaligus meningkatkan ketahanan energi nasional. Sutrisno et al., (2021) mencontohkan implementasi nasionalisme sumber daya dalam sektor pertambangan batubara melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Regulasi ini menegaskan kewajiban peningkatan nilai tambah, pengolahan, dan pemurnian di dalam negeri, serta membatasi ekspor bahan mentah. Dengan demikian, sumber daya strategis seperti batubara tidak hanya berperan sebagai komoditas ekspor, tetapi juga sebagai instrumen untuk memperkuat kapasitas energi nasional dan pembangunan industri hilir.

Selain batubara, sektor minyak dan gas bumi juga menjadi contoh klasik penerapan

nasionalisme sumber daya di Indonesia. Sejak era nasionalisasi aset perusahaan Belanda pada 1960-an hingga kebijakan renegotiasi kontrak karya pertambangan di era reformasi, negara berusaha menegaskan kembali kontrol terhadap sumber daya alam demi kepentingan jangka panjang. Strategi ini memiliki implikasi ganda: pertama, memperkuat penerimaan negara melalui optimalisasi royalti dan pajak; kedua, menyediakan basis energi yang relatif stabil bagi pembangunan nasional. Dengan demikian, nasionalisme sumber daya bukan sekadar konsep politik ekonomi, melainkan juga dimensi pertahanan non-militer yang berkaitan langsung dengan kemandirian bangsa dalam menghadapi tekanan eksternal.

Kemandirian pertahanan merupakan kelanjutan logis dari nasionalisme sumber daya, karena kedaulatan suatu negara tidak hanya ditentukan oleh kapasitas mengelola sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan mengembangkan industri pertahanan yang mandiri. Indonesia telah merumuskan kerangka kebijakan menuju kemandirian industri pertahanan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan. Undang-undang ini mendasari pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP) yang berfungsi sebagai lembaga koordinatif lintas sektor dalam merumuskan strategi, regulasi, serta arah pembangunan industri pertahanan nasional (Manan et al., 2022).

Kebijakan tersebut diarahkan untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor alat utama sistem senjata (alutsista) dari negara maju. Sejarah panjang ketergantungan pada impor persenjataan menunjukkan kerentanan strategis, terutama ketika terjadi embargo atau ketegangan diplomatik. Kasus embargo militer Amerika Serikat pada awal 2000-an, misalnya, memperlihatkan betapa rapuhnya sistem pertahanan Indonesia akibat absennya kemandirian industri dalam negeri. Oleh karena itu, penguatan industri pertahanan nasional melalui KKIP dan berbagai regulasi turunan dimaksudkan untuk membangun ekosistem pertahanan yang berkelanjutan, inovatif, dan berbasis sumber daya domestik.

Kemandirian pertahanan bukan hanya persoalan produksi alutsista, tetapi juga mencakup aspek logistik, riset, teknologi, dan pengembangan sumber daya manusia. Keterlibatan perguruan tinggi dan lembaga penelitian dalam mendukung industri pertahanan menjadi kunci, sebagaimana terlihat dalam upaya kolaborasi PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, dan Lembaga Penelitian serta Inovasi Nasional (BRIN). Dengan demikian, kemandirian pertahanan merupakan hasil integrasi berbagai komponen bangsa yang digerakkan oleh visi kepemimpinan strategis untuk mengurangi kerentanan eksternal.

Nasionalisme sumber daya dan kemandirian pertahanan saling melengkapi sebagai strategi pertahanan nasional. Di satu sisi, kontrol negara atas sumber daya strategis memastikan ketersediaan energi, bahan baku, serta pendanaan yang cukup untuk menopang industri pertahanan. Di sisi lain, kemandirian pertahanan menjamin bahwa sumber daya strategis dapat dimanfaatkan secara efektif untuk menghasilkan kekuatan militer yang otonom. Hubungan ini menunjukkan bahwa penguatan nasionalisme sumber daya tanpa kemandirian pertahanan akan menghasilkan surplus ekonomi tanpa daya tangkal yang memadai, sementara kemandirian pertahanan tanpa basis sumber daya nasional akan menghadapi keterbatasan material. Oleh karena itu, integrasi keduanya menjadi prasyarat bagi Indonesia dalam mewujudkan doktrin pertahanan adaptif menuju Indonesia Emas 2045.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian literatur (literature review) dan analisis kebijakan untuk mengkaji relevansi pendekatan *America First* era Donald Trump terhadap strategi kemandirian logistik dan doktrin pertahanan Indonesia. Kajian literatur dipilih karena mampu memberikan landasan konseptual sekaligus memetakan temuan penelitian

sebelumnya yang relevan (Dunn, 2017). Analisis kebijakan digunakan untuk menelaah implikasi kebijakan nasionalisme sumber daya dan strategi pertahanan yang diterapkan Amerika Serikat, serta kemungkinan adopsinya dalam konteks Indonesia (Dunn, 2017).

Sebagai teknik analisis, penelitian ini menggunakan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) untuk memetakan faktor internal dan eksternal yang memengaruhi upaya kemandirian logistik dan pertahanan Indonesia. Menurut Rangkuti (2018), analisis SWOT efektif dalam merumuskan strategi karena mengintegrasikan evaluasi kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal. Pendekatan ini relevan untuk menghubungkan kepemimpinan strategis global dengan kebutuhan adaptasi doktrin pertahanan nasional.

Sumber data penelitian berasal dari dokumen akademik (buku, jurnal ilmiah), laporan pertahanan resmi, artikel kebijakan, serta literatur terkait geopolitik dan strategi global. Penggunaan sumber sekunder dipandang memadai karena memungkinkan analisis komparatif lintas negara sekaligus mengaitkan teori kepemimpinan dengan konteks pertahanan Indonesia. Dengan demikian, metode ini diharapkan mampu menghasilkan analisis komprehensif dan rekomendasi konseptual yang sesuai dengan visi pembangunan pertahanan Indonesia menuju 2045.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan America First Era Trump

Kepemimpinan Donald Trump melalui kebijakan *America First* dapat dipahami dalam kerangka teori kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis-militer. Meskipun dalam praktiknya kebijakan tersebut banyak menuai kontroversi, analisis akademik memperlihatkan bahwa Trump berusaha membangun legitimasi politik dan arah kebijakan luar negeri dengan cara yang khas, yakni menekankan kemandirian nasional, proteksionisme ekonomi, serta mobilisasi sumber daya strategis sebagai instrumen kekuatan.

Dalam perspektif kepemimpinan transformasional, Trump menggunakan narasi kemandirian dan supremasi nasional untuk menginspirasi rakyat Amerika. Burns (1978) menjelaskan bahwa kepemimpinan transformasional berfungsi mengangkat moralitas dan motivasi pengikut ke tingkat yang lebih tinggi dengan mengedepankan visi jangka panjang. Slogan *Make America Great Again* dalam hal ini berperan bukan sekadar sebagai retorika kampanye, melainkan sebagai instrumen mobilisasi nasionalisme sumber daya dan simbol kolektif kebangkitan industri domestik. Namun, berbeda dengan model normatif Burns yang sarat dengan nilai moral dan etika, gaya kepemimpinan Trump cenderung populis, proteksionis, dan pragmatis. Hal ini menimbulkan ambiguitas, di mana transformasi yang ia dorong tidak sepenuhnya berorientasi pada peningkatan nilai moral, melainkan lebih pada penguatan basis dukungan politik dan kepentingan ekonomi domestik.

Dari sisi kepemimpinan adaptif, Heifetz (1994) menekankan bahwa pemimpin harus mampu mengelola ketegangan sosial, menghadapi resistensi, dan merespons perubahan lingkungan yang kompleks. *America First* dapat dipahami sebagai bentuk respon adaptif terhadap krisis manufaktur dan defisit perdagangan AS pasca era globalisasi. Melalui penerapan tarif impor baja dan aluminium serta tekanan pada perusahaan-perusahaan agar memproduksi di dalam negeri, Trump berupaya mengoreksi apa yang ia sebut sebagai “maladaptasi” struktural ekonomi akibat liberalisasi pasar yang terlalu luas. Secara teoritis, hal ini mencerminkan upaya mengembalikan kapasitas domestik agar lebih tangguh terhadap persaingan global. Namun, sebagaimana dicatat dalam literatur kebijakan internasional (Dufour & Ducasse, 2020), strategi adaptif ini justru menimbulkan resistensi kuat dari mitra dagang, memicu perang dagang dengan

Tiongkok, dan memperdalam ketegangan dalam sistem perdagangan global. Dengan demikian, America First lebih mencerminkan adaptasi defensif daripada adaptasi inovatif sebagaimana ditekankan Heifetz.

Dalam kerangka kepemimpinan strategis-militer, kebijakan Trump ditandai dengan reindustrialisasi pertahanan. Anggaran militer AS pada tahun 2018 mencapai USD 700 miliar, difokuskan untuk modernisasi teknologi siber, ruang angkasa, dan sistem persenjataan mutakhir (Cancian, 2019). Strategi ini sejalan dengan teori kepemimpinan strategis yang menekankan visi jangka panjang dan kesiapan logistik dalam menghadapi kompetisi geopolitik multidomain. Namun, gaya unilateral Trump mengguncang stabilitas aliansi tradisional seperti NATO dan AUKUS, memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara strategi domestik dengan kebutuhan membangun kepercayaan internasional.

America First juga mengedepankan energi sebagai instrumen geopolitik. Revolusi shale gas memungkinkan AS beralih dari importir menjadi eksportir energi, sehingga memperkuat daya tawar Washington dalam hubungan internasional. Colgan (2019) mencatat bahwa kebijakan energi ini digunakan untuk mengurangi ketergantungan Eropa terhadap Rusia, sekaligus memperluas pengaruh geopolitik AS. Dengan demikian, energi diposisikan tidak hanya sebagai sumber ekonomi domestik, tetapi juga sebagai senjata diplomasi dalam arena global.

America First juga merepresentasikan proteksionisme dan nasionalisme sumber daya yang kental. Wilson (2015) menekankan bahwa nasionalisme sumber daya muncul dari kombinasi faktor politik domestik dan kepentingan strategis negara. Dalam kasus Trump, basis politik berupa kelas pekerja manufaktur yang merasa tertinggal akibat globalisasi menjadi faktor utama pendorong kebijakan proteksionis. Hal ini konsisten dengan teori Wilson karena menggabungkan orientasi politik dalam negeri dengan tujuan strategis eksternal, yakni mempertahankan supremasi Amerika di tengah kompetisi global.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan Trump dalam kerangka America First memperlihatkan penerapan teori kepemimpinan yang kompleks dan multidimensi. Ia menggunakan retorika transformasional untuk menginspirasi, strategi adaptif untuk merespons tekanan global, serta pendekatan strategis-militer untuk memperkuat daya tangkal nasional. Namun, keberhasilan kebijakan ini tetap bersifat ambivalen karena dalam praktiknya sering menimbulkan fragmentasi internasional dan resistensi eksternal.

Implikasi terhadap Strategi Kemandirian Logistik Indonesia

Refleksi atas kebijakan America First Donald Trump memberikan pembelajaran strategis bagi Indonesia dalam merumuskan kemandirian logistik pertahanan. Trump menggunakan proteksionisme, reindustrialisasi, dan nasionalisme sumber daya untuk membangun kemandirian domestik, meskipun dengan konsekuensi diplomatik. Dalam konteks Indonesia, hal ini relevan karena ketergantungan pada impor alat utama sistem senjata (alutsista) dan komponen logistik pertahanan masih tinggi. Embargo militer Amerika Serikat pada awal 2000-an menjadi bukti nyata bahwa kemandirian logistik merupakan prasyarat bagi stabilitas pertahanan jangka panjang (Manan, Gunadi, & Deksino, 2025).

Untuk memperdalam analisis, pendekatan SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) digunakan untuk memetakan posisi Indonesia. Hasil identifikasi faktor internal dan eksternal menggunakan analisis SWOT adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Analisis SWOT

Aspek	Uraian
Strengths (Kekuatan)	- Fondasi industri pertahanan domestik melalui BUMN strategis: PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL. - Dukungan regulasi: UU No. 16 Tahun 2012 tentang Industri Pertahanan dan pembentukan Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP). - Nilai kejuangan TNI dan basis ideologis Pancasila sebagai legitimasi moral pertahanan. - Potensi mobilisasi melalui visi transformasional “Indonesia Emas 2045” sebagai narasi kolektif untuk menginspirasi aktor pertahanan.
Weaknesses (Kelemahan)	- Ketergantungan tinggi pada transfer teknologi asing. Keterbatasan riset, inovasi, dan integrasi antara industri, akademisi, dan militer. - Anggaran pertahanan relatif kecil terhadap PDB sehingga membatasi modernisasi alutsista.
Opportunities (Peluang)	- Bonus demografi 2030 yang berpotensi menyediakan SDM unggul. - Potensi sumber daya alam strategis (nikel, migas, batubara) untuk mendukung logistik pertahanan. - Geopolitik Indo-Pasifik membuka peluang peran Indonesia sebagai kekuatan regional (<i>middle power</i>). - Peluang diplomasi pertahanan dan kemitraan strategis untuk memperkuat industri pertahanan nasional.
Threats (Ancaman)	- Risiko embargo militer dari negara pemasok alutsista. - Rivalitas geopolitik AS-China yang dapat menyeret Indonesia dalam kompetisi blok. - Ancaman multidomain: siber, disinformasi, dan disrupti rantai pasok global. - Tekanan eksternal dalam pengelolaan sumber daya strategis,

Hasil pemetaan pada Tabel 1 memperlihatkan bahwa kemandirian logistik Indonesia membutuhkan kepemimpinan yang integratif. Dari sisi transformasional, dibutuhkan visi yang mampu menggerakkan seluruh komponen bangsa, serupa dengan bagaimana Trump menggunakan slogan MAGA meskipun dengan orientasi berbeda. Dari sisi adaptif, Indonesia perlu fleksibel menghadapi ancaman embargo dan kompetisi teknologi dengan cara memperkuat ekosistem riset dan inovasi nasional. Dari sisi strategis-militer, Indonesia harus membangun defense in depth dengan logistik yang mandiri agar tidak rentan terhadap tekanan eksternal.

Dengan demikian, implikasi America First bagi Indonesia adalah urgensi untuk mengintegrasikan nasionalisme sumber daya dengan strategi pertahanan. Proteksionisme Trump

memang memunculkan resistensi global, tetapi logika kemandirian yang melandasinya dapat dijadikan refleksi untuk memperkuat doktrin pertahanan Indonesia. Artinya, strategi kemandirian logistik tidak hanya soal teknis industri, melainkan juga tentang kepemimpinan visioner yang mampu mengartikulasikan nilai kejuangan TNI dan Pancasila dalam kebijakan pertahanan adaptif menuju 2045.

Refleksi terhadap Doktrin Pertahanan Indonesia

Kebijakan America First yang dijalankan oleh Donald Trump memberikan cermin penting bagi Indonesia dalam upaya reformulasi doktrin pertahanan nasional. Meskipun konteks politik, ekonomi, dan militer antara Amerika Serikat dan Indonesia berbeda secara signifikan, sejumlah prinsip fundamental yang terkandung dalam kebijakan tersebut relevan untuk diadaptasi, dengan tetap berlandaskan pada falsafah Pancasila, nilai kejuangan TNI, dan visi strategis Indonesia Emas 2045.

Pertama, terdapat keterkaitan langsung antara nasionalisme sumber daya dengan Pancasila dan nilai kejuangan TNI. Sila ke-3 Persatuan Indonesia menegaskan pentingnya kepentingan kolektif di atas kepentingan asing, sehingga pengelolaan sumber daya strategis harus diarahkan untuk memperkuat kedaulatan bangsa. Demikian pula, sila ke-5 Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia menuntut agar hasil pemanfaatan sumber daya tidak hanya dinikmati oleh segelintir elite, tetapi dapat memberi manfaat luas bagi kesejahteraan rakyat. Nilai kejuangan TNI seperti kemandirian, keikhlasan, dan pengabdian total harus menjadi fondasi etis dalam perumusan doktrin pertahanan. Dengan basis tersebut, strategi nasionalisme sumber daya dapat diorientasikan untuk memperkuat kemandirian bangsa, bukan sekadar melindungi kepentingan jangka pendek atau eksklusif.

Kedua, urgensi doktrin pertahanan adaptif semakin nyata dalam menghadapi lingkungan strategis global yang multipolar dan penuh ketidakpastian. Era Trump menunjukkan bahwa negara dengan kapasitas besar pun harus mampu menyesuaikan diri terhadap ancaman multidomain, mulai dari perang dagang, siber, disinformasi, hingga kerentanan rantai pasok global. Indonesia, sebagai negara kepulauan dengan posisi geostrategis di Indo-Pasifik, tidak dapat hanya bertumpu pada kekuatan militer konvensional. Hal ini selaras dengan teori kepemimpinan adaptif Heifetz (1994), yang menekankan kemampuan pemimpin dalam mengelola ketidakpastian, memobilisasi kapasitas kolektif, dan menjaga ketegangan sosial-politik pada level yang produktif untuk perubahan.

Ketiga, doktrin pertahanan Indonesia ke depan harus mampu mengintegrasikan dimensi kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis-militer. Dari sisi transformasional, diperlukan visi moral dan motivasi kolektif yang mampu menginspirasi seluruh komponen bangsa dalam pembangunan pertahanan. Visi “Indonesia Emas 2045” dapat berfungsi sebagai narasi transformasional untuk menggerakkan rakyat, birokrasi, dan industri pertahanan menuju kemandirian. Dari sisi adaptif, kepemimpinan nasional dituntut untuk mampu membaca dinamika global yang cepat berubah serta merespons dengan kebijakan fleksibel yang tetap menjaga stabilitas nasional. Dari sisi strategis-militer, diperlukan perencanaan jangka panjang yang konsisten untuk membangun postur pertahanan yang tangguh, modern, dan siap menghadapi ancaman multidomain.

Dengan kerangka tersebut, refleksi atas America First menegaskan bahwa doktrin pertahanan Indonesia tidak boleh hanya bersifat reaktif terhadap ancaman, tetapi harus proaktif dalam membangun ketahanan nasional yang berkarakter. Proaktif berarti tidak menunggu munculnya ancaman, melainkan secara aktif mengantisipasi dan menyiapkan instrumen pertahanan sejak dini, baik dalam ranah militer maupun non-militer. Dalam konteks ini, integrasi nasionalisme sumber daya dengan kepemimpinan strategis dapat melahirkan doktrin pertahanan

adaptif yang relevan dengan tantangan masa depan, sekaligus berakar kuat pada nilai Pancasila dan perjuangan TNI.

Oleh karena itu, pembelajaran dari America First seharusnya tidak diterapkan secara literal, melainkan diadopsi secara selektif dan disesuaikan dengan kondisi Indonesia. Reformulasi doktrin pertahanan harus memadukan visi moral yang mempersatukan, adaptabilitas menghadapi kompleksitas global, serta kekuatan strategis-militer yang konsisten. Dengan demikian, Indonesia dapat mengembangkan doktrin pertahanan yang adaptif, inklusif, dan berorientasi pada tujuan jangka panjang menuju Indonesia Emas 2045.

KESIMPULAN

Penelitian ini merefleksikan bahwa kebijakan America First era Donald Trump memberikan pelajaran penting bagi Indonesia dalam merumuskan kemandirian logistik dan doktrin pertahanan adaptif. Secara teoritis, pendekatan tersebut dapat dianalisis melalui kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis-militer. Dari sisi transformasional, America First menegaskan pentingnya visi besar dan mobilisasi kolektif, meskipun dalam praktiknya lebih bersifat populis dan proteksionis. Dari sisi adaptif, kebijakan ini menunjukkan upaya mengoreksi krisis struktural akibat globalisasi, walaupun menimbulkan resistensi internasional.

Refleksi terhadap Indonesia memperlihatkan bahwa kemandirian logistik pertahanan harus bertumpu pada nasionalisme sumber daya yang diintegrasikan dengan visi strategis jangka panjang. Analisis SWOT menegaskan bahwa kekuatan berupa basis industri pertahanan BUMN dan dukungan regulasi harus dioptimalkan, sementara kelemahan seperti ketergantungan teknologi asing dan keterbatasan riset perlu segera diatasi. Peluang besar berupa bonus demografi dan potensi sumber daya alam harus dimanfaatkan untuk memperkuat industri pertahanan nasional, sedangkan ancaman eksternal seperti embargo militer, rivalitas geopolitik, dan ancaman multidomain menuntut kesiapan adaptif yang konsisten. Dengan demikian, doktrin pertahanan Indonesia perlu dikembangkan secara proaktif, integratif, dan berorientasi pada kepemimpinan transformasional, adaptif, dan strategis-militer. Doktrin ini harus berakar pada Pancasila dan nilai perjuangan TNI, sekaligus relevan dengan dinamika geopolitik Indo-Pasifik dan visi Indonesia Emas 2045.

Sebagai saran, penelitian selanjutnya dapat memperdalam analisis dengan pendekatan empiris melalui studi kasus pembangunan industri pertahanan Indonesia atau perbandingan dengan negara lain yang berhasil menerapkan nasionalisme sumber daya dalam sektor pertahanan. Dengan cara ini, refleksi teoritis dapat diperkuat dengan data lapangan sehingga menghasilkan rekomendasi yang lebih aplikatif bagi pengembangan doktrin pertahanan nasional.

DAFTAR REFERENSI

- Antonio. (2020). *The Rise and Fall of Great-Power Competition Under Trump's "America First" Doctrine*. Foreign Affair Room. <https://www.faf.ae/home/2025/6/1/the-rise-and-fall-of-great-power-competition-under-trumps-america-first-doctrine?>
- Burns, James M. (2010). *Leadership*. Harper Publishers.
- Cancian, M. F. (2019). U.S. Military Forces in FY 2020: The Struggle to Align Forces with Strategy. Center for Strategic and International Studies (CSIS). <https://www.csis.org>
- Colgan, J. D. (2019). The Trump administration and energy geopolitics: Oil, gas, and geostrategy. Oxford Energy Forum, 117, 3–6.
- DUFOR, G., & DUCASSE, D. (2020). "America First" and the Return of Economic

- Isolationism and Nationalism to the United States: A Historic Turning Point for International Trade Law. *Canadian Yearbook of International Law/Annuaire Canadien de Droit International*, 57. <https://www.cambridge.org/core/journals/canadian-yearbook-of-international-law-annuaire-canadien-de-droit-international/article/abs/america-first-and-the-return-of-economic-isolationism-and-nationalism-to-the-united-states-a-historic-turning-point-for-international-trade-law/871140EF188124A0F4BFB556CE882DB4?>
- Dunn, W. N. (2017). *Public Policy Analysis An Integrated Approach* (7th ed.). Routledge.
- Fetzer, T. (2020). Nationalism and Economy. *Nationalities Papers*, 48(1). <https://www.cambridge.org/core/journals/nationalities-papers/article/nationalism-and-economy/52EA2BA3A994FB0C965B0629697A750E/share/7bc0ac3f6e9815d23252697d31a41121ada01f3c?>
- Heifetz. (1998). *Leadership Without Easy Answers*. Harvard University Press.
- IDEI. (2025). *Dampak Kebijakan “America First” Trump terhadap Indonesia dan BRICS*. IDEI. https://idei.or.id/2025/02/06/dampak-kebijakan-america-first-trump-terhadap-indonesia-dan-brics/?utm_source=chatgpt.com
- Manan, M., Gunadi, G. I., & Deksin, G. R. (2022). Memupuk Nasionalisme Dalam Industri Pertahanan. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(2), 2461–2468.
- Rangkuti, F. (2018). *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis Cara Perhitungan Bobot, Rating, dan OCAI*. PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Root, A. (2025). *Why Trump Is Reviewing the ‘AUKUS Alliance’ and What It Means for Defense Stocks*. Aerospace and Defense. <https://www.barrons.com/articles/trumps-aucus-review-submarine-defense-stocks-b5f131dd?>
- Sutrisno, A. T., Hanita, M., & Yoesgiantoro, D. (2021). Analisis Resources Nationalism pada Kebijakan Sektor Pertambangan Batubara terhadap Ketahanan Energi Indonesia. *Jurnal Kajian Stratejik Ketahanan Nasional*, 4(2). <https://doi.org/10.7454/jkskn.v4i2.10051>
- Sukma, R. (2021). Indonesian defense strategy in the era of global power competition. RSIS Policy Report. Nanyang Technological University.
- Wilson, J. D. (2015). *DYNAMICS AND POLITICAL INSTITUTIONS*. 21(4), 1–28.